

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENGACU PADA VISI INDONESIA EMAS 2045



Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/2024/02/19/perencanaan-pembangunan-daerah-mengacu-pada-visi-indonesia-emas-2045/>

Mataram (Suara NTB)-Perencanaan pembangunan di Provinsi NTB, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus mengacu salah satunya pada visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjelaskan, visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Berdaulat yaitu bagaimana ketahanan NKRI dan memiliki kemandirian dan aman. Kemudian maju yang memiliki arti berdaya secara modern serta tangguh inovatif dan adil. Selanjutnya berkelanjutan memiliki makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Bagaimana peran kita dalam mewujudkan visi negara berdaulat, maju dan berkelanjutan itulah yang kita harus kita rumuskan di dalam RPJPD kita, tegas H. Iswandi saat memberikan pemaparan di Forum Group Discussion (FGD) perencanaan rancangan pembangunan yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Senin, 19 Februari 2024.

Menurutnya, di dalam RPJPN tersebut sudah ditegaskan bahwa di tahun 2045 mendatang, Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ini merupakan arahan visi dari pembangunan nasional yang diturunkan ke daerah.

Selanjutnya pencapaian ini harus mempedomani lima sasaran visi. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita suatu negara maju, kemudian kemiskinan menuju nol persen serta

ketimpangan berkurang. Sasaran visi lainnya yaitu kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat.

Sasaran visi selanjutnya yaitu daya saing sumberdaya manusia meningkat serta intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission dengan penurunan 93,5 persen. Lima visi yang nasional ini menjadi acuan juga di dalam merumuskan lima sasaran visi pembangunan di NTB, ujar Iswandi.

Selanjutnya, rancangan pembangunan daerah di NTB harus mengacu pada 8 misi agenda pembangunan transformasi menyeluruh dan 17 arah Pembangunan Indonesia Emas 2045.

Iswandi juga mamaparkan Evaluasi Kinerja RPJPD 2005-2025 Provinsi NTB. Di mana target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB akhir tahun 2025 adalah di atas atau sama dengan rata-rata Nasional. Sebagai gambaran, tahun 2023 IPM NTB sebesar 72,37 poin, capaiannya di atas NTT (68,40), dan di bawah Bali (78,01), Indonesia (74,39), dan Sulawesi Selatan (Sulsel) (74,60).

Pertumbuhan IPM kurun waktu 2002-2023 sebesar 14,57%, tertinggi dibanding Bali (10,51%), SulSel (9,30%), Indonesia (8,59%), dan NTT (8,1%). Adapun jika dihitung dari kurun waktu tahun 2005-2022, IPM NTB tumbuh sebesar 9,95%, tertinggi dibanding Bali (8,23%), Sulsel (6,54%), Indonesia (4,82%), dan NTT (4,81%).

Sementara pengangguran terbuka Provinsi NTB target akhir tahun 2025 adalah di bawah 5%. Gambaran pengangguran terbuka NTB tahun 2023 sebesar 2,80%, berada di atas Bali (2,69) dan berada di bawah NTT (3,14%), Sulsel (4,33%), dan Indonesia (5,32%).

Penurunan angka pengangguran kurun waktu tahun 2003-2023 sebesar 55,84%, berada di bawah Sulsel (75,00%), dan diatas Indonesia (44,98%), NTT (34,85%), dan Bali (49,81%). Penurunan kurun waktu tahun 2005-2023 sebesar 72,79%, berada di bawah Sulsel (72,82%), dan di atas Indonesia (52,67%), NTT (34,85%), dan Bali (49,44%), tambahnya.

Adapun persentase penduduk miskin berdasarkan evaluasi kinerja RPJPD 2005-2025 target di akhir tahun 2025 adalah yaitu di bawah 10%. Kondisi di tahun 2023 sebesar 13,85%, capaiannya di atas NTT (19,96%), dan di bawah Bali (4,25%), Suleel (8,7%), dan Indonesia (9,36%). Kurun waktu tahun 2003-2023 sebesar 47,42%, tertinggi dibanding dengan Indonesia (46,27%), Sulsel (40,00%), Bali (42,10%), dan NTT (30,26%). Sementara di kurun waktu tahun 2005-2023, turun sebesar 46,57%, tertinggi dibanding dengan Sulsel (41,92%), Indonesia (41,39%), Bali (36,76%), NTT (29,19%).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi NTB target akhir tahun 2025 adalah naik atau meningkat. Misalnya ekonomi NTB tanpa tambang tahun 2023 sebesar 4,74%, dengan tambang sebesar

3,66%. Ekonomi dengan tambang terendah dibanding Bali (5,86%), Indonesia (5,05%), NTT (4,14%), dan Sulsel (3,79%).

Kurun waktu 2003-2023, ekonomi NTB dengan tambang, sebesar -6,15%, dibandingkan dengan Sulsel (18,44%), Bali (62,78%), Indonesia (23,17%), dan NTT (-29,83%). Dengan tambang kurun waktu 2005-2023, NTB tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 114,04%, dibandingkan Indonesia (-9,82%), NTT (19,65%), Bali (5,40%), dan SulSel (-59,25%), terangnya.(ris)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/02/19/perencanaan-pembangunan-daerah-mengacu-pada-visi-indonesia-emas-2045/>;
2. <https://bappeda.ntbprov.go.id/buka-fgd-forum-perangkat-daerah-doktor-iswandi-harapkan-opd-provinsi-ntb-bagi-peran-capai-target-pembangunan/>

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, disebutkan bahwa:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
11. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
12. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:
 - a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
 - d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
13. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara:
 - a. Transparan;
 - b. Responsif;
 - c. Efisien;
 - d. Efektif;
 - e. Akuntabel;
 - f. Partisipatif;
 - g. Terukur;
 - h. Berkeadilan;
 - i. Berwawasan lingkungan; dan
 - j. Berkelanjutan.
14. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
 - a. Teknokratik;

- b. Partisipatif;
 - c. Politis; dan
 - d. Atas-bawah dan bawah-atas.
15. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
- a. Holistik-tematik;
 - b. Integratif; dan
 - c. Spasial.
16. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.
17. Rencana pembangunan daerah terdiri atas:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
18. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.